

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era Digital yang saat ini semakin berkembang termasuk dalam ranah pemerintahan. Transparansi pemerintah menjadi isu yang sangat krusial dalam meningkatkan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang dimana hal tersebut dapat mendorong dan membantu masyarakat agar dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wanda Aprilla et al. (2024) mengatakan bahwa “Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan merupakan elemen penting untuk membangun dasar yang kokoh bagi demokrasi yang sehat. Transparansi memungkinkan pemerintah beroperasi secara terbuka di hadapan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.”

Sebagai respon terhadap kebutuhan akan transparansi dalam administrasi pemerintahan, muncul gagasan *Open Government*. *Open Government* merupakan pemerintahan yang lebih partisipatif, inovatif, dan transparan. *Open Government Indonesia* (OGI) yang mulai didirikan pada tanggal 20 September 2011 merupakan bagian dari gerakan global *Open Government Partnership* (OGP).

Tujuan dari adanya *Open Government* adalah untuk menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong keterlibatan publik dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah

satu pelaksanaan *Open Government* ini dapat dimulai dari keterbukaan akan data-data yang dimiliki oleh pemerintah.

Pelaksanaan *Open Government* yang dilakukan melalui keterbukaan data yang dimiliki pemerintah ini merupakan pemberian akses kepada publik, yang didukung oleh inisiatif pengembangan Portal *Open Data*, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses data pemerintah secara terbuka.

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menjelaskan Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, darr/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. Data dan informasi yang disajikan dalam Portal *Open Data* merupakan data terbuka, yang dimana data tersebut memang diperuntukan untuk menjadi konsumsi publik. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data terbuka dan data dikecualikan.

Data terbuka merupakan jenis data yang dapat diakses, digunakan, dimanfaatkan, dan disebarluaskan secara bebas oleh publik tanpa adanya pembatasan hak akses yang ketat. Meskipun demikian, penggunaan data terbuka tetap mensyaratkan atribusi yang tepat kepada pemilik atau penyedia data, seperti mencantumkan sumber data secara jelas.

Data terbuka biasanya disajikan dalam format yang dapat diolah kembali (*reusable*), seperti CSV atau JSON, sehingga memudahkan pengguna untuk

menggunakannya dalam berbagai kepentingan, termasuk analisis, inovasi teknologi, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik data terbuka terdiri dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan umumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu segala ketentuan mengenai Informasi Publik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Data dikecualikan merupakan data yang tidak dapat diakses publik karena bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan tertentu jika dibuka. Seperti data intelejen keamanan, dokumen rahasia negara, dan rencana proyek sebelum diumumkan secara resmi. Lebih lanjutnya jenis informasi atau data yang dikecualikan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tepatnya pada pasal 17 pada BAB V tentang Informasi yang dikecualikan.

Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mendukung adanya pelaksanaan *Open Government* melalui keterbukaan akan informasi publik yang disajikan dan dapat diakses melalui portal *Open Data* Bandung.

Portal *Open Data* Bandung ini merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung menjadi contoh yang relevan untuk diteliti dalam konteks pelaksanaan

*Open Government*. Dalam mekanisme pengumpulan data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berperan sebagai walidata yaitu pengelola seluruh data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandung.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan *Open Government* melalui *Open Data* merupakan salah satu hal yang penting. Karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berperan sebagai produsen data atau penyedia data. Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data tingkat Daerah bertugas untuk menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung memiliki Petugas Data dan Informasi (PEDASI) masing-masing. Petugas Data dan Informasi (PEDASI) ini berperan untuk membantu pengelolaan data yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. Pengelolaan tersebut dimulai dari merencanakan, mengumpulkan data, menginput data, sampai dengan memperbaharui data.

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian literatur yang didapatkan, peneliti menemukan masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan *Open Data* ini, yaitu adanya ketimpangan ketersediaan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung di Portal *Open Data*. Ketimpangan ini mengacu pada kondisi dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung konsisten dan aktif menyediakan, memperbarui, serta mengunggah data yang mereka miliki ke dalam Portal *Open Data*.

Masalah tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Bustomi, Achdiat dan Endah Marlovia (2021) yang berjudul “INISIATIF *OPEN DATA* PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG”, yang menyatakan bahwa Dataset yang telah terunggah pada portal *Open Data* masih terbatas.

Selain itu masalah ketimpangan ketersediaan data tersebut juga didukung oleh Laporan Mengenai Jumlah Dataset di Portal *Open Data* berdasarkan Perangkat Daerah yang diberikan oleh Tenaga Ahli Data Administrator Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yang terlihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Dataset Berdasarkan Perangkat Daerah

| No | OPD                                                | Jumlah Dataset |
|----|----------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Dinas Kesehatan                                    | 90             |
| 2  | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung      | 68             |
| 3  | Kecamatan Cibiru                                   | 59             |
| 4  | Kecamatan Sukasari                                 | 58             |
| 5  | Kecamatan Cibeunying Kaler                         | 57             |
| 6  | Kecamatan Gedebage                                 | 57             |
| 7  | Kecamatan Bojongloa Kidul                          | 56             |
| 8  | Badan Pusat Statistik Kota Bandung                 | 56             |
| 9  | Kecamatan Arcamanik                                | 55             |
| 10 | Kecamatan Mandalajati                              | 55             |
| 11 | Kecamatan Antapani                                 | 55             |
| 12 | Kecamatan Cicendo                                  | 55             |
| 13 | Kecamatan Panyileukan                              | 55             |
| 14 | Kecamatan Regol                                    | 54             |
| 15 | Kecamatan Cinambo                                  | 53             |
| 16 | Kecamatan Sumur Bandung                            | 53             |
| 17 | Kecamatan Sukajadi                                 | 53             |
| 18 | Kecamatan Coblong                                  | 53             |
| 19 | Kecamatan Cibeunying Kidul                         | 53             |
| 20 | Kecamatan Andir                                    | 52             |
| 21 | Kecamatan Bandung Kulon                            | 51             |
| 22 | Kecamatan Rancasari                                | 50             |
| 23 | Kecamatan Cidadap                                  | 49             |
| 24 | Kecamatan Kiaracondong                             | 49             |
| 25 | Kecamatan Batununggal                              | 48             |
| 26 | Kecamatan Bandung Wetan                            | 47             |
| 27 | Kecamatan Buahbatu                                 | 46             |
| 28 | Kecamatan Bandung Kidul                            | 45             |
| 29 | Kecamatan Ujungberung                              | 45             |
| 30 | Kecamatan Lengkong                                 | 42             |
| 31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 41             |
| 32 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                    | 38             |
| 33 | Kecamatan Babakan Ciparay                          | 38             |

| No | OPD                                                        | Jumlah Dataset |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|
| 34 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         | 34             |
| 35 | Dinas Pendidikan                                           | 34             |
| 36 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung                       | 34             |
| 37 | Sekretariat Daerah                                         | 31             |
| 38 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 31             |
| 39 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | 31             |
| 40 | Kecamatan Astanaanyar                                      | 29             |
| 41 | Kecamatan Bojongloa Kaler                                  | 28             |
| 42 | Dinas Perhubungan                                          | 27             |
| 43 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       | 26             |
| 44 | Kementerian Agama RI                                       | 20             |
| 45 | Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening                    | 15             |
| 46 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                     | 13             |
| 47 | Dinas Pemuda dan Olahraga                                  | 12             |
| 48 | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga                       | 12             |
| 49 | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana                 | 12             |
| 50 | Dinas Arsip dan Perpustakaan                               | 12             |
| 51 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | 10             |
| 52 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu             | 9              |
| 53 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                    | 9              |
| 54 | Satuan Polisi Pamong Praja                                 | 8              |
| 55 | Otoritas Jasa Keuangan                                     | 8              |
| 56 | Dinas Ketenagakerjaan                                      | 8              |
| 57 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                        | 7              |
| 58 | Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari                     | 7              |
| 59 | Dinas Lingkungan Hidup                                     | 6              |
| 60 | Badan Meteorologi dan Geofisika                            | 6              |
| 61 | Dinas Sosial                                               | 5              |
| 62 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                          | 5              |
| 63 | Badan Pendapatan Daerah                                    | 4              |
| 64 | Badan Pangan Nasional                                      | 4              |
| 65 | Palang Merah Indonesia                                     | 4              |
| 66 | Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut                          | 4              |
| 67 | Kementrian Agama Kota Bandung                              | 3              |
| 68 | Perusahaan Listrik Negara                                  | 2              |
| 69 | Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang          | 2              |
| 70 | Sekretariat DPRD                                           | 2              |
| 71 | Pengadilan Militer II-09 Bandung                           | 1              |
| 72 | Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung                       | 1              |
| 73 | Pengadilan Agama Bandung                                   | 1              |
| 74 | Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat              | 1              |
| 75 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah                  | 1              |
| 76 | Pengadilan Negeri Bandung                                  | 1              |
| 77 | Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung                  | 0              |
| 78 | Badan Keuangan dan Aset Daerah                             | 0              |
| 79 | Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung           | 0              |
| 80 | Perumda Bank Bandung                                       | 0              |
| 81 | Balai Besar Wilayah Sungai Citarum                         | 0              |
| 82 | Inspektorat Kota                                           | 0              |

Sumber: Laporan Tenaga Ahli Administrator DISKOMINFO Kota Bandung (2025)

Berdasarkan tabel jumlah dataset yang disediakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung, dapat terlihat bahwa partisipasi dalam penyediaan data informasi publik masih belum merata. Meskipun

terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan (90 dataset) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (68 dataset) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menyuplai data terbuka, sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya justru menunjukkan angka partisipasi yang tergolong rendah. Bahkan, masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyumbangkan dataset sama sekali, seperti Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Perumda Bank Bandung.

Meskipun hingga saat ini belum terdapat target resmi yang mengatur jumlah dataset yang harus disediakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketimpangan jumlah data yang dipublikasikan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap menjadi persoalan dalam konteks pelaksanaan *Open Government*. Prinsip partisipasi dalam pemerintahan terbuka mendorong seluruh instansi pemerintah untuk secara aktif dan merata menyumbang data yang relevan dan dibutuhkan publik. Ketika hanya sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang konsisten menyediakan data, sementara lainnya pasif, maka hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan partisipasi dalam penyediaan informasi publik. Ketimpangan ini berpotensi menghambat telaksananya prinsip-prinsip *Open Government*.

Berdasarkan permasalahan tersebut juga dapat diindikasikan bahwa Petugas Data dan Informasi (PEDASI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan data informasi publik secara aktif, rutin, dan komprehensif untuk diunggah ke portal *Open Data* masih belum optimal.

Hal tersebut berkaitan dengan komitmen dan kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung inisiatif *Open Data* melalui kontribusi data yang berkelanjutan.

Komitmen dan kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung inisiatif *Open Data* selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Bustomi, Achdiat dan Endah Marlovia (2021) yang berjudul “INISIATIF *OPEN DATA* PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG”, yang menyatakan bahwa “hanya PEDASI pada sebagian dinas saja yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan *Open Data* di OPD masing-masing.”

Faktor yang menyebabkan Petugas Data dan Informasi (PEDASI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam menyediakan data informasi publik secara aktif, rutin, dan komprehensif untuk diunggah ke portal *Open Data* ini adalah belum adanya insentif atau *reward* yang diberikan kepada Petugas Data dan Informasi (PEDASI) yang bertugas. Sehingga para Petugas Data dan Informasi (PEDASI) tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan *Open Data*.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan *Open Government* melalui Portal *Open Data*. Karena kondisi tersebut merupakan permasalahan yang terjadi pada salah satu prinsip *Open Government* yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2016) yaitu prinsip partisipasi (*participation*).



Berdasarkan dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN *OPEN GOVERNMENT* MELALUI PORTAL *OPEN DATA* DI KOTA BANDUNG :Studi Kasus Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik**”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang saat ini dilakukan guna membatasi studi yang telah diteliti. Fokus penelitian bersifat kondisional sesuai berlangsungnya penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Pelaksanaan *Open Government* melalui Portal *Open Data* Bandung di Kota Bandung Khususnya pada Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung.

Menggunakan analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dalam *Open Government* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengatakan bahwa prinsip *Open Government* atau pemerintahan yang terbuka itu terdiri dari tiga prinsip yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*accountability*), dan partisipasi (*participation*)

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana pelaksanaan *Open Government* melalui portal *Open Data* Bandung di Kota Bandung: Studi Kasus Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik**”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *Open Government* melalui portal *Open Data* Bandung di Kota Bandung khususnya pada Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik.

#### **1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan memberi kontribusi dalam mengembangkan teori-teori Ilmu Administrasi Publik khususnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan *Open Government*.
2. Secara praktis, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau solusi mengenai koreksi yang bermanfaat bagi pelaksanaan *Open Government* melalui Portal *Open Data* Bandung di Kota Bandung terutama yang terfokus Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik.